

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) : “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen; Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen; Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Data pertumbuhan ekonomi nasional, meningkat dari 5,03% ditahun 2016 menjadi 5,07% ditahun 2017, peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global yang mendorong perbaikan nilai ekspor, pendapatan yang berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan investasi yang semakin meningkat. Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5,27% dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri dan pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga diikuti oleh ekspor barang dan jasa.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,20% jika dibanding tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan nasional. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2019 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,85 ±0,25% diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada hakikatnya merupakan komponen pendukung, pembentuk atau penyumbang PDRB. Bila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi $(Y) = \text{Konsumsi } (C) + \text{Investasi } (I) + \text{Belanja Pemerintah } (G) + (\text{Ekspor-Import } / X-M)$, maka komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal selama periode 2011-2016 yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 85-90 persen, Ekspor juga mempunyai peran yang besar, karena sekitar 57-73 persen produk Kabupaten Tegal mampu menembus pasar internasional dan antar daerah.

Demikian juga dengan impor, karena di atas 79 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk capital/investasi (PMTB) juga mempunyai peran dengan kontribusi sekitar 23-26 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada tahun 2011-2016 perdagangan internasional Kabupaten Tegal yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih rendah dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Kabupaten Tegal dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi ketergantungan antar wilayah yang signifikan dalam proses perekonomian.

Distribusi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tegal dari tahun 2011- 2016 tertinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Tegal 2011 - 2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Konsumsi RumahTangga	85,75	86,54	87,83	87,46	85,98	85,16
2. Konsumsi LNPRT	1,31	1,36	1,44	1,55	1,42	1,40
3. Konsumsi Pemerintah	7,27	7,43	7,59	7,60	7,48	7,61
4. PMTB	23,81	25,76	25,26	25,66	25,05	24,84
5. Perubahan Inventori	3,74	9,47	5,13	3,73	1,22	0,49
6. Ekspor	59,22	57,86	73,76	65,11	61,77	60,40
7. Import	81,10	88,42	101,01	91,07	82,92	79,89
Total PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2017

Dari aspek “input” PDRB, dapat diketahui komposisi penyumbang PDRB yaitu konsumsi rumah tangga, serta ekspor dikurangi impor. Belanja pemerintah (*government expenditure*) hanya menyumbang 7,61% terhadap terbentuknya PDRB. Dari kondisi “input” ini, dapat diperoleh hasil kondisi “output” yakni PDRB itu sendiri.

Selama periode 2012–2016 perkembangan PDRB Kabupaten Tegal baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010 terus mengalami peningkatan walaupun dengan besaran pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Tegal sebesar 27.727.792,98 juta rupiah menurut harga berlaku dan 21.265.717,23 juta rupiah menurut harga konstan (2010=100). Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012 sampai 2016 berkisar antara 5,23 persen sampai 28,81 persen, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi tercatat di tahun 2013 sebesar 6,73% dan terendah tahun 2014 sebesar 5,03%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten untuk tahun 2016 mencapai 6,37% lebih tinggi pertumbuhan tahun sebelumnya dan di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Diharapkan untuk tahun-tahun ke depan gerak ekonomi di Kabupaten Tegal akan semakin baik dan stabil, sehingga ekonomi bisa tumbuh tinggi tetapi dengan kualitas yang lebih baik yaitu pertumbuhan yang tinggi dan diikuti dengan pemerataan pembangunan yang baik.

Tabel 3.2.
Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Jutaan Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4
2012	18.761.760,13	16.912.249,74	5,23
2013	20.767.110,98	18.050.291,97	6,73
2014	23.108.651,43	18.958.841,04	5,03
2015	25.590.642,44	19.992.675,45	5,45
2016	27.727.792,98	21.265.717,23	6,37

Sumber: BPS, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal 5 tahun terakhir cukup stabil yaitu di kisaran angka 5-6 persen, kecuali di tahun 2016 yang melesat cukup tinggi. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup baik dan modal bagi Kabupaten Tegal untuk bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal. Dengan semakin banyak investasi yang masuk roda pembangunan diharapkan akan berputar lebih cepat, dan akan membawa Kabupaten Tegal ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Sumber pertumbuhan pada tahun 2016 untuk Kategori Industri pengolahan sebesar 7,73 persen. Kategori Industri pengolahan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sebesar 33,43 persen.

Tabel 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal
dirinci berdasarkan Kategori tahun 2012-2016

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,90	1,51	4,30	2,78	3,63
B	Pertambangan dan Penggalian	4,92	5,98	6,17	2,10	6,75
C	Industri Pengolahan	8,57	12,57	8,13	6,66	7,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,53	7,31	4,24	1,65	0,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	0,67	3,91	0,30	1,27
F	Konstruksi	5,70	4,32	4,51	5,54	5,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,55	4,45	5,17	4,12	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	5,20	9,29	9,11	8,76	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	2,26	6,94	7,18	8,40
J	Informasi dan Komunikasi	10,25	9,19	8,82	9,00	7,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,16	3,54	7,29	7,19
L	Real Estat	3,49	4,17	6,10	7,30	7,83
M	Jasa Perusahaan	5,26	11,54	8,10	9,23	8,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,10	2,04	0,76	5,10	2,96
O	Jasa Pendidikan	17,47	8,91	9,72	6,92	9,43
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	5,70	8,50	4,98	6,93
Q	Jasa lainnya	0,99	9,31	8,73	3,13	4,37
Produk Domestik Regional Bruto		5,23	5,23	6,73	5,03	6,37

Sumber: BPS, 2017

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.4
Distribusi PDRB Kabupaten Tegal
Dirinci berdasarkan perkategori Tahun 2012 - 2106

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016	2017*
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,70	14,89	15,13	12,50	15,70
B	Pertambangan dan Penggalian	3,83	4,48	4,45	4,55	4,17
C	Industri Pengolahan	31,56	32,53	33,22	34,72	32,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,50	7,74	7,57	7,63	7,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,49	16,07	15,64	15,73	16,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2,47	2,61	2,64	2,71	2,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,14	4,18	4,27	2,32
J	Informasi dan Komunikasi	2,67	2,62	2,52	2,66	2,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,33	2,32	2,29	2,32
L	Real Estat	1,60	1,62	1,60	1,65	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,42	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,33	2,28	2,25	2,33
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,11	5,04	5,61	5,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,78	0,78	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,11	2,23	2,14	2,13	2,15
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Sementara itu selama tahun 2017 tingkat inflasi Kabupaten Tegal terutama Kota Slawi secara umum mencapai 3,58% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,67%. Perkiraan tahun 2019 inflasi di Kabupaten pada kisaran $3,5 \pm 1\%$ dengan asumsi terjaganya pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat, optimalisasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta terjaganya ekspektasi positif dimasyarakat.

Dari kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2018 dan 2019, perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. **Tantangan** ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan pasar global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.

2. Ketersediaan bahan baku industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

3. Peningkatan investasi
Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.
4. Laju konversi lahan pertanian
Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.
5. Kesiapan sebagai destinasi internasional
Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah di Kabupaten Tegal dapat merasa *mbetahi* dan *ngangeni*.
6. Kualitas sumber daya manusia
Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potens sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Tercatat sebesar 58,03 persen penduduk yang usia 15 tahun. Angka yang cukup besar.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensid apat dikembangkan. Beberapa **peluang** pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi investasi dari ibukota
Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.
2. Jalur tol yang melintasi wilayah kabupaten
Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
3. Tumbuhnya destinasi baru berbasis masyarakat
Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya pasar domestik
 “Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI)
5. Keberadaan sarana unggulan
 Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
6. Iklim investasi yang sehat
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Dari kondisi eksisting yang ada, dapat dirumuskan proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2018 dan 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Tegal
Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator	Target	
		RKPD 2018	RKPD 2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,85±0,25	5,85±0,25
2	Inflasi	5,75±0,5	5,75±0,5
3	Nilai Investasi PMDN	795.750.500.000	825.500.000.000
4	Nilai Investasi PMA	46.000.000.000	48.000.000.000
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,96	3,86
6	Kemiskinan (%)	8,75	8,25

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2018

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2019 sesuai dengan Target sebesar 5,85%±0.25% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkir bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku
6. Daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional

Sementara **arah kebijakan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan prioritas pada sektor kontribusi terbesar dalam PDRB (pertanian, industri, perdagangan)
Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian, industri dan perdagangan.
2. Meningkatkan konsumsi masyarakat
PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Menurunkan kemiskinan
Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.
4. Melakukan revisi tata ruang
RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari ditandai dengan upaya revisi RTRW.
5. Mewujudkan iklim investasi yang sehat
Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.
6. Menumbuhkan kewirausahaan pemuda
Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.
7. Menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat dan protein
Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.
8. Mendorong konsumsi karbohidrat dan protein
Selain ketersediaan, konsumsi karbohidrat dan protein menjadi perhatian pemerintah yang akan difasilitasi melalui program dan kegiatan. Kampanye dan penyediaan bahan pangan karbohidrat dan protein telah menjadi agenda pemerintah daerah.
9. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (wisata, usaha tani, perdagangan)
Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.
10. Meningkatkan promosi potensi daerah
Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

11. Pengendalian inflasi
Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.
12. Meningkatkan investasi pemerintah
Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.
13. Merintis skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)
Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KPBU. Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2019 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2019 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2019 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)
 - a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan komponen pajak daerah lainnya serta retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - b. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - c. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
 - d. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - e. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - f. Meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara menyeluruh.

2. Kebijakan umum Dana Perimbangan
 - a. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan aparatur lainnya.
 - b. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
 - c. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - a. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana sertifikasi bagi tenaga pendidik.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.
 - d. Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 berdasarkan pada rata-rata pertumbuhannya dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2017
dan Proyeksi Tahun 2018-2019

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	APBD 2018	RKPD 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.097.095.623.983	2.161.160.096.814	2.444.873.358.571	2.615.959.568.000	2.658.857.026.841
1.1	Pendapatan Asli Daerah	304.000.970.135	316.050.226.960	375.138.711.151	399.909.505.000	398.143.464.341
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	64.737.082.699	69.810.605.561	97.179.813.740	96.590.344.000	102.328.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.220.835.174	21.291.475.246	19.654.670.695	21.968.290.000	25.107.240.541
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	9.236.793.181	11.403.678.765	25.475.140.654	21.186.048.000	15.355.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	211.806.259.081	213.544.467.388	232.829.086.062	260.164.823.000	255.353.223.800
1.2	Dana Perimbangan	1.186.593.271.696	1.493.483.951.400	1.505.651.807.702	1.533.280.729.000	1.576.737.628.500
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	32.554.722.696	40.792.559.417	38.360.380.613	36.381.885.000	36.381.885.000
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1.085.549.293.000	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.174.494.182.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	68.489.256.000	290.589.280.983	325.623.713.089	352.404.662.000	365.861.561.500
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	606.501.382.152	351.625.918.454	564.062.839.718	682.769.334.000	683.975.934.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.026.800.725	9.507.387.780	148.166.061.223	152.846.800.000	152.846.800.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	140.539.246.005	138.509.897.674	164.221.871.495	188.026.177.000	188.026.177.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	350.887.481.000	-	-	-	26.206.600.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi	27.427.695.422	20.396.897.000	17.648.608.000	25.000.000.000	35.000.000.000
1.3.5	DID	-	-	-	35.000.000.000	281.896.357.000
1.3.6	Dana Desa dari Pem pusat	81.620.159.000	183.211.736.000	234.026.299.000	281.896.357.000	683.975.934.000

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2018

- e. Asumsi yang digunakan terhadap proyeksi penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2019 merupakan asumsi maksimal dari potensi yang kemungkinan dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk perhitungan Dana Desa masih mendasarkan pada asumsi penetapan APBD tahun 2018 dikarenakan belum adanya informasi lebih lanjut mengenai nominal yang dapat diterima pada saat penyusunan RKPD.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa dialokasikan dengan memperhatikan perhitungan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan partai politik dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan umum untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap OPD melalui pemberian

- honorarium PNS dan non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan oleh OPD melalui pembelian barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
 3. Belanja Modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Pada Belanja Bantuan Keuangan khususnya yang ditujukan untuk desa asumsi yang digunakan adalah adanya penambahan alokasi untuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung visi misi kepala daerah berupa pemberian bantuan keuangan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar Rp118.087.607.000,00 dan PDPM sebesar Rp21.075.000.000,00. Bantuan kepada Desa tersebut ditambah alokasi bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar yang diasumsikan Rp7.804.975.800,00.

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah maka asumsi belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019 adalah dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2017
dan Proyeksi Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	RKPD
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Belanja Daerah	1.934.297.115.658	2.422.128.524.079	2.447.503.798.903	2.789.114.512.000	2.833.291.585.764
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.280.476.225.911	1.477.182.958.527	1.435.900.459.681	1.581.068.842.000	1.546.194.824.136
2.1.1	Belanja Pegawai	1.044.662.759.749	1.085.026.104.926	969.159.817.411	1.034.303.823.000	1.034.303.823.000
2.1.3	Belanja Hibah	10.570.714	17.124.000.000	46.171.465.900	68.947.218.000	-
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.330.991.077	15.868.428.000	16.837.300.000	20.632.000.000	37.044.000.000
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	22.545.360.000	8.906.448.453	9.980.183.500	10.029.933.000	25.939.200.000
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	7.736.422.556	343.020.582.921	386.059.908.954	441.155.868.000	10.029.933.000
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	196.884.671.815	7.237.394.227	7.691.783.916	6.000.000.000	432.877.868.136
2.2	Belanja Langsung	653.820.889.747	944.945.565.552	1.011.603.339.222	1.208.045.670.000	1.287.096.761.628

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2018

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2019 adalah :

1. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tidak menyertakan Peneluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2017
dan Proyeksi Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	RKPD
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Pembiayaan Daerah					
3.1	Penerimaan Daerah	263.448.674.165	413.199.627.518	133.104.079.627	182.003.944.000	179.434.558.923
3.1.1	Penggunaan SILPA	263.255.866.829	412.628.549.288	119.670.200.252	169.163.402.000	79.434.558.923
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	13.159.458.900	12.840.542.000	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	142.807.336	571.078.230	274.420.475	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	50.000.000	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	100.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.618.633.202	32.561.000.000	23.941.000.000	8.849.000.000	5.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	16.000.000.000	10.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	13.500.000.000	16.561.000.000	13.941.000.000	8.849.000.000	5.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	118.633.202	-	-	-	-
3.2.4	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	249.830.040.963	380.638.627.518	109.163.079.627	173.154.944.000	174.434.558.923

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2018

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9 sebagai berikut.

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019
		(Rp)
1	PENERIMAAN DAERAH	2.838.291.585.764
1.1	Pendapatan Daerah	2.658.857.026.841
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	398.143.464.341
1.2.2	Dana Perimbangan	1.576.737.628.500
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	683.975.934.000
1.2	Penerimaan Pembiayaan	179.434.558.923
1.2.1	SiLPA	79.434.558.923
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	-
1.2.3	Penerimaan Piutang Daerah	100.000.000.000
2	Gaji dan Tunjangan	1.034.303.823.000
3	Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	448.907.801.136
3.1	Belanja Tidak Langsung	448.907.801.136
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	1.355.079.961.628

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2018

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2019 sebesar Rp.1.355.079.961.628,00, selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Langsung dalam RKPD tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.287.096.761.628,00 sebagai Prioritas II dan Belanja Hibah sebesar Rp.37.044.000.000,00 serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.25.939.200.000,00.

Tabel 3.10
Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	1.355.079.961.628
1.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi KDH	1.355.079.961.628
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	63.033.000.000
2.1	Belanja Hibah	37.044.000.000
2.2	Belanja Bantuan Sosial	25.939.200.000
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.322.541.852.400

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2018

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka selanjutnya dapat disusun rencana alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dalam Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
dalam RKPD Tahun 2019

No	Uraian	APBD Tahun 2018	RKPD Tahun 2019	Bertambah (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN	2.615.959.568.000	2.658.857.026.841	42.897.458.842	1,64
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	399.909.505.000	398.143.464.341	(1.766.040.659)	(0,44)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.590.344.000	102.328.000.000	5.737.656.001	5,94
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.968.290.000	25.107.240.541	3.138.950.541	14,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.186.048.000	15.355.000.000	(5.831.048.000)	(27,52)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	260.164.823.000	255.353.223.800	(4.811.599.200)	(1,85)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.533.280.729.000	1.576.737.628.500	43.456.899.500	2,83
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.381.885.000	36.381.885.000	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum *	1.144.494.182.000	1.174.494.182.000	30.000.000.000	2,62
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	352.404.662.000	365.861.561.500	13.456.899.500	3,82
	- DAK Fisik	60.209.000.000	71.008.352.500	10.799.352.500	17,94
	- DAK Non Fisik	292.195.662.000	294.853.209.000	2.657.547.000	0,91
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	682.769.334.000	683.975.934.000	1.206.600.000	0,18
1.3.1	Pendapatan Hibah	152.846.800.000	152.846.800.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	188.026.177.000	188.026.177.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	25.000.000.000	26.206.600.000	1.206.600.000	4,83
1.3.6	DID	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-
1.3.7	Dana Desa dari Pem pusat	281.896.357.000	281.896.357.000	-	-
2	BELANJA	2.789.114.512.000	2.833.291.585.764	44.177.073.764	1,58
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.581.068.842.000	1.546.194.824.136	(34.874.017.864)	(2,21)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.303.823.000	1.034.303.823.000	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	68.947.218.000	37.044.000.000	(31.903.218.000)	(46,27)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000	25.939.200.000	5.307.200.000	25,72
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10.029.933.000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	441.155.868.000	432.877.868.136	(8.277.999.864)	(1,88)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.208.045.670.000	1.287.096.761.628	79.051.091.628	6,54
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.084.767.000	201.873.330.000	(9.211.437.000)	(4,36)
2	Dinas Kesehatan	159.667.665.000	151.700.097.000	(7.967.568.000)	(4,99)
3	RSUD Dr Soeselo	148.933.545.000	263.836.270.228	114.902.725.228	77,15

No	Uraian	APBD Tahun 2018	RKPD Tahun 2019	Bertambah (Berkurang)	%
4	RSUD Suradadi	42.020.746.000	33.654.946.000	(8.365.800.000)	(19,91)
5	Dinas Pekerjaan Umum	244.341.827.000	239.000.270.000	(5.341.557.000)	(2,19)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	96.650.000.000	54.925.000.000	(41.725.000.000)	(43,17)
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.852.970.000	1.209.921.900	(643.048.100)	(34,70)
8	Satpol Pamong Praja	10.274.035.000	7.667.937.000	(2.606.098.000)	(25,37)
9	Dinas Sosial	4.960.000.000	4.133.836.000	(826.164.000)	(16,66)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.153.150.000	10.600.613.500	(552.536.500)	(4,95)
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.985.000.000	19.115.000.000	(870.000.000)	(4,35)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.805.121.000	5.617.621.000	(187.500.000)	(3,23)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.902.100.000	8.186.100.000	(716.000.000)	(8,04)
14	Dinas Perhubungan	13.381.820.000	25.656.499.000	12.274.679.000	91,73
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.162.064.000	3.815.360.000	(1.346.704.000)	(26,09)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.282.000.000	3.292.000.000	10.000.000	0,30
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.387.990.000	2.624.990.000	237.000.000	9,92
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.418.500.000	7.727.000.000	2.308.500.000	42,60
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.412.850.000	9.014.110.000	(398.740.000)	(4,24)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.682.842.000	32.518.533.000	8.835.691.000	37,31
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.621.910.000	34.986.520.000	13.364.610.000	61,81
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.103.360.000	13.242.000.000	7.138.640.000	116,96
23	Sekretariat Daerah	25.134.040.000	21.001.583.000	(4.132.457.000)	(16,44)
24	Sekretariat DPRD	24.526.000.000	21.899.120.000	(2.626.880.000)	(10,71)
25	Kecamatan Adiwerna	756.648.000	560.648.000	(196.000.000)	(25,90)
26	Kecamatan Balapulang	625.148.000	396.900.000	(228.248.000)	(36,51)
27	Kecamatan Bojong	996.848.000	470.848.000	(526.000.000)	(52,77)
28	Kecamatan Bumijawa	856.898.000	510.398.000	(346.500.000)	(40,44)
29	Kecamatan Dukuhturi	604.148.000	550.148.000	(54.000.000)	(8,94)
30	Kecamatan Dukuhwaru	487.558.000	495.558.000	8.000.000	1,64
31	Kecamatan Jatinegara	644.898.000	460.898.000	(184.000.000)	(28,53)
32	Kecamatan Kedungbanteng	793.558.000	474.058.000	(319.500.000)	(40,26)
33	Kecamatan Kramat	2.136.628.000	1.226.628.000	(910.000.000)	(42,59)
34	Kecamatan Lebaksiu	518.648.000	487.648.000	(31.000.000)	(5,98)
35	Kecamatan Margasari	542.781.000	562.531.000	19.750.000	3,64
36	Kecamatan Pagerbarang	594.398.000	654.000.000	59.602.000	10,03
37	Kecamatan Pangkah	744.148.000	557.148.000	(187.000.000)	(25,13)
38	Kecamatan Slawi	7.407.148.000	6.050.946.000	(1.356.202.000)	(18,31)
39	Kecamatan Suradadi	4.770.469.000	6.473.338.000	1.702.869.000	35,70
40	Kecamatan Talang	708.148.000	696.148.000	(12.000.000)	(1,69)
41	Kecamatan Tarub	684.148.000	467.148.000	(217.000.000)	(31,72)

No	Uraian	APBD Tahun 2018	RKPD Tahun 2019	Bertambah (Berkurang)	%
42	Kecamatan Warurejo	611.148.000	572.148.000	(39.000.000)	(6,38)
43	BPBD	2.375.000.000	2.978.000.000	603.000.000	25,39
44	Inspektorat	3.408.800.000	9.824.500.000	6.415.700.000	188,21
45	Bappeda dan Litbang	8.058.500.000	7.551.500.000	(507.000.000)	(6,29)
46	BPKAD	49.029.660.000	53.820.925.000	4.791.265.000	9,77
47	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.808.040.000	5.218.040.000	(1.590.000.000)	(23,35)
48	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	8.138.000.000	8.738.000.000	600.000.000	7,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(173.154.944.000)	(174.434.558.923)	(1.279.614.923)	(0,74)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	173.154.944.000	174.434.558.923	1.279.614.923	(0,74)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.003.944.000	179.434.558.923	(29.150.600.964)	(1,41)
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	169.163.402.000	79.434.558.923	(116.310.058.964)	(53,04)
3.1.	Penerimaan Kembali Dana Cadangan Pilkada	12.840.542.000	-	(12.840.542.000)	(100,00)
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	100.000.000.000	100.000.000.000	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.849.000.000	5.000.000.000	(3.849.000.000)	(56,50)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000	5.000.000.000	(3.849.000.000)	(56,50)
3.2.3	Cadangan Pilkada Bupati			-	
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	0

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal 2018